

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN AN EFFORT TO IMPROVE ONLINE BASED SERVICES IN PADANG PARIAMAN DISTRICT

Alifa Wulandari¹, Roni Ekha Putera², Andri Rusta³

¹²³Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

Alifawulandari9@gmail.com, roniekhaputera@soc.unand.ac.id, arusta@soc.unand.ac.id

ABSTRAK: *E-government* merupakan salah satu mekanisme yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat dalam menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi acuan setiap daerah dalam proses penerapan *e-governemnt*. Termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang juga turut menerapkan SPBE demi terciptanya pelayanan yang lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien yang mana ini sesuai dengan visinya yaitu “Padang Pariaman Berjaya”. Salah satu fenomena menarik ialah dimana Dinas Kominfo yang bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan suatu inovasi berupa absensi online yang mengalami kendala dikalangan ASN dan non-ASN dalam penggunaannya, inovasi ini dinami dengan Aplikasi SIKAP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-government* dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori elemen sukses pengembangan *e-government* oleh Harvard JFK School of Management yaitu dengan melihat tiga elemen (*support, capacity* dan *value*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam elemen *support* yaitu pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah memuat unsur *political will* dalam penerapan *e-government*, kesepakatan bersama sudah terjalin dengan masyarakat, swasta, dan OPD. Serta sumber daya, infrastruktur dan suprastruktur sudah terpenuhi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Elemen selanjutnya yaitu *capacity* yang memuat tiga hal didalamnya berupa; ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompetisi dan keahlian yang dibutuhkan. Dan terakhir elemen *value* yang mana pemerintah benar-benar teliti dalam mengartikan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, *E-government*, Aplikasi SIKAP

ABSTRACT: *E-Government* is one of the mechanisms that utilizes information technology as a tool to govern more effectively and efficiently. This is regulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE), which serves as a reference for every region in the implementation of egovernment. This includes Padang Pariaman Regency, which has also adopted SPBE to achieve more accountable, transparent, effective, and efficient services, aligned with its vision of "Prosperous Padang Pariaman." One interesting phenomenon is the collaboration between the Department of Communication and Information (DinasKominfo) and the Regional Personnel Agency (BKPSDM) of Padang Pariaman Regency, which introduced an innovation in the form of online attendance. This innovation received both pros and cons among civil servants (ASN) and non-civil servants in its usage, realized through the SIKAP Application. This thesis aims to analyze the implementation of E-government in efforts to enhance online-based services in Padang Pariaman Regency. The research

employs a qualitative approach with a case study method. The theory utilized in this research is the theory of successful e-government development elements by Harvard JFK School of Management, focusing on three elements: support, capacity, and value. The research findings indicate that in the element of support, the local government of Padang Pariaman Regency has included the element of political will in the implementation of e-government. Collaborative agreements have been established with the community, private sector, and government agencies. Additionally, the necessary resources, infrastructure, and superstructure are fulfilled by the local government of Padang Pariaman. The subsequent element, capacity, encompasses three factors: sufficient financial resources to carry out various e-government initiatives, adequate technological infrastructure, and the availability of competent and skilled human resources. Lastly, the value element illustrates how the government carefully interprets the needs of the community.

Keywords: Implementation, E-Government, SIKAP Application.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara-negara berkembang semakin pesat, ditandai dengan pemanfaatan TIK dalam setiap sektor pemerintahan. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan pondasi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kehadiran teknologi, informasi dan komunikasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta dengan sangat cepat, akurat, dan tepat. Termasuk pemerintah Indonesia yang memanfaatkan TIK dalam penggunaan jaringan internet untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bentuk layanan publik dan layanan pemerintahan.

Menurut World Bank *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, dan aparatur pemerintah. Sedangkan pengertian lainnya, *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. *E-government* memiliki tujuan untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan. Dengan adanya *e-government* tentu akan mengubah semua tata cara kinerja OPD pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam mendukung pengimplementasian *e-government* pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan inovasi-inovasi baru berupa aplikasi penunjang SPBE seperti: Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, Aplikasi SIAPkan, Aplikasi Sipakem Dukcapil, Aplikasi Pengaduan, Aplikasi Pasar Nagari, dan lainnya. Aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi agar terciptanya transparansi antar pemerintah selaku pemberi layanan dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Salah satu aplikasi yang diluncurkan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman ialah Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP). Aplikasi SIKAP merupakan sebuah *mobile*aplikasi atau berbasis web dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penerapan disiplin, absensi, dan kinerja ASN di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Surat Menteri yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2016 dengan nama surat PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa “mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.” Ini juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayan publik dan menciptakan transparansi di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Aplikasi SIKAP merupakan suatu perubahan yang diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai, dengan memberikan berbagai manfaat dan kemudahan terhadap para ASN dan non-ASN dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi ini dapat digunakan bagi para ASN maupun non-ASN yang bertugas di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan struktur administrasi melalui data dari BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman lalu dilanjutkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman, serta dilakukan sosialisasi kepada setiap OPD dan dijalankan oleh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Pengambilan absensi yang awal mulanya menggunakan *fingerprint* sebagai alat untuk absensi pegawai yang mana ini dianggap kurang efektif dan memakan banyak biaya, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang bekerjasama dengan BKPSDM dan Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman menciptakan Aplikasi SIKAP dengan manfaat untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam melihat kinerja ASN dan non-ASN serta untuk menghitung tunjangan penghasilan pegawai lewat kinerja dan kehadiran.

Sistem SIKAP dapat melakukan verifikasi posisi kehadiran pegawai dengan jarak maksimal 200 meter dari kantor dalam pengambilan absensi. Dengan jam kehadiran dan kepulungan pegawai yang telah ditetapkan di dalam aplikasi. Aplikasi ini berisikan berbagai fitur-fitur seperti: absensi masuk, absensi pulang, ajukan cuti, laporan harian, rekap hadir bulan ini, bawahan langsung, jadwal saya, rekap laporan, dan rekap kehadiran. Aplikasi SIKAP hanya dapat digunakan pada *smartphone* android dan tidak tersedia dalam perangkat *Ios*. Para ASN yang menggunakan Aplikasi SIKAP harus melaporkan kegiatan harian sebanyak 5 laporan perharinya ke dalam aplikasi. Penggunaan Aplikasi SIKAP dikalangan ASN dan honorer masih terdapat kendala, karena beberapa OPD merasa terbebani dengan penerapan.

B. PEMBAHASAN

Elemen Sukses Penerapan E-Government Di Kabupaten Padang Pariaman

1. Support

Eko Indrajit menyatakan bahwa elemen *support* merupakan suatu keinginan yang harus dimiliki dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-governemnt*. Terdapat beberapa dukungan yaitu sebagai berikut:

a. Political Will

Dengan adanya unsur *political will* pembangunan dan pengembangan *e-government* akan berjalan mulus, begitupun dalam pengimplementasian *e-government* harus di mulai dari para pemimpin pemerintahan pada level tertinggi sebelum diteruskan ke level dibawahnya. Keterlibatan para pemimpin bukan hanya omongan semata, namun harus ada tindakan dan dukungan agar konsep *e-government* berjalan sesuai harapan.

Dalam menunjang implementasi *e-governmnet* di Kabupaten Padang Pariaman bupati berada pada level tertinggi pemerintahannya yang memiliki peran penting dalam mendukung terlaksana konsep *e-government*. *Political will* merupakan elemen pertama yang harus dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung implementasi *e-government*. Adanya *political will* dari pemimpin menandakan keseriusan dan komitmen pemerintah dalam pengambilan kebijakan,

Political will tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Padang Pariaman, peraturan ini yang menjadi *master plan* pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2025 dalam penerapan *e-government*. Dengan adanya peraturan tersebut Bupati Padang Pariaman selaku pemimpin daerah terus mengeluarkan berbagai inovasi-inovasi baru yang berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman untuk menunjang pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam penerapan dan penggunaan Aplikasi SIKAP bagi para pegawai harus sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang ada.

b. Komitmen

Sesuai dengan kemauan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan *e-government*, harus ada komitmen langsung terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Komitmen yang dilaksanakan dapat berupa peraturan, Surat Ketetapan dan dokumen lainnya. Dengan adanya berbagai inovasi yang telah di luncurkan menjadi suatu tolak ukur adanya suatu komitmen dari pemerintah daerah.

Regulasi dalam penggunaan Aplikasi SIKAP sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang hari kerja, jam kerja, dan kegiatan rutin daerah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Kedua aturan ini menjadi dasar dalam penggunaan Aplikasi SIKAP di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

c. Kesepakatan Bersama

Dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Padang Pariaman tentu tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang mengambil peran, dengan perlu adanya kesepakatan bersama antar pemerintah dengan masyarakat serta pihak swasta maka *e-government* dapat terwujud dengan semestinya.

Nyatanya kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman belum melakukan kesepakatan bersama kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan objek atau sasaran yang mendapatkan layanan dari pemerintah. Namun kesepakatan dengan sektor swasta tentu menjadi poin penting pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman agar penerapan *e-government* dapat berjalan dengan semestinya. Seperti kerjasama yang dijalin oleh Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dengan PT. Indonesia Comnets Plus dengan tujuan jaringan dan fasilitas internet di Kabupaten Padang Pariaman tersedia dengan baik.

Aplikasi SIKAP bagi beberapa pegawai ASN dan non ASN dianggap kurang efektif. Karena masih ada beberapa oknum pegawai yang datang ke kantor hanya untuk mengisi absensi sehingga tugas dan kewajibannya tidak dilaksanakan dengan semestinya. Begitupun penerapan Aplikasi SIKAP di kalangan tenaga pengajar yang dianggap tidak efektif mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan di lingkungan sekolah, serta para guru merasa terbebani dengan pembuatan 5 laporan dalam sehari.

d. Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Informasi Layak

Dalam mendukung terlaksananya *e-government* perlu adanya sumberdaya manusia, keuangan dan informasi layak. Dengan tersedianya sumber daya tersebut maka pelayanan yang dikembangkan dalam penerapan *e-government* dapat terlaksanakan dengan baik. Ketersediaan SDM di Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman masih butuh peningkatan mengingat masih ada pegawai yang tidak berlatar belakang IT. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Dinas Kominfo untuk meningkatkan mutu dan keahlian pegawainya. Selain itu Dinas Kominfo mengalami kendala yang berupa *digital divide* di kalangan ASN dan non-ASN karena masih ada yang minim literasi terhadap implementasi *e-government*, dengan di luncurkan Aplikasi SIKAP maka dari itu Diskominfo menunjuk satu orang dari berbagai instansi yang berperan sebagai admin Aplikasi SIKAP untuk menyebar luas informasi terkait penggunaannya.

Sedangkan dari segi keuangan Diskominfo dengan kebutuhan yang ada dirasa masih belum tercukupi, walaupun Aplikasi SIKAP ini hanya satu kali Diskominfo membuatnya namun pemeliharaan aplikasi juga memakan banyak anggaran. Terakhir dari segi informasi mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, maka Diskominfo membentuk PPID yang bertugas sebagai jembatan untuk masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan layanan. Serta Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan kerjasama dengan beberapa media cetak dan media online untuk penyebarluasan informasi.

Pengembangan dan penyebar luasan *e-government* tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang SPBE pada pasal 15 sampai pasal 24 yang menjelaskan infrastruktur SPBE didalamnya. Infrastruktur dan suprastruktur dalam pengembangan *e-*

government sudah tersedia dengan baik. Mulai dari ketersediaan data center, jaringan dan internet hingga ketersediaan suprastruktur sudah diperhatikan oleh Diskoinfo Kabupaten Padang Pariaman.

e. Sosialisasi

Dalam menunjang keberhasilan penerapan Aplikasi SIKAP tidak terlepas dengan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang sangat diperlukan dalam mendorong individu agar dapat memahami peran dan statusnya. Sosialisasi Aplikasi SIKAP dilakukan oleh Dinas Kominfo dan BKPSDM kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi SIKAP dengan cara menghadiri para admin yang ditunjuk di masing-masing OPD, serta para admin tersebut yang akan menjelaskan bagaimana cara kerja dan penggunaan dari Aplikasi SIKAP ini.

Sosialisasi terkait Aplikasi SIKAP dilaksanakan di Aula kantor bupati Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo bekerjasama dengan BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat sosialisai menjelaskan terkait cara kerja aplikasi, manfaat, keuntungan, dan fitur-fitur yang terdapat didalamnya..

2. Capacity

Pada aspek kedua terkait *capacity* merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan. Dengan memperhatikan beberapa hal seperti;

A. Ketersediaan Sumber Daya Finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government

Sumber daya finansial yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Dinas Kominfo dalam mengcover semua layanan. Dengan ketersediaan anggaran 8M pertahunnya ini dirasa masih kurang untuk memnuhi kebutuhan, maka dari itu Dinas Kominfo terus berupaya untuk melakukan manajemen anggaran sebaik mungkin agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik.

Faktor lain juga dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang begitu luas dan masih ada beberapa daerah yang tidak ada akses internetnya, maka dari itu Dinas Kominfo terus berupaya untuk mesamaratakan penggunaan internet di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

B. Ketersedian infrastruktur teknologi informasi yang memadai

Dari ketersediaan sumber daya finansial yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Diskominfo maka juga perlu adanya ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai demi terlaksananya *e-government* disuatu daerah. Ketersedian infrastruktur dapat berupa perangkat keras seperti komputer, jaringan dan infrastruktur lainnya merupakan faktor teramat penting dalam penerapan *e-government*. Kurangnya sarana dan prasarana akan mengakibatkan kesulitan dalam meningkatkan kualitas pegawai yang ahli dalam bidangnya.

Ketersedian infrastruktur di Dinas Kominfo cukup memadai namun masih perlu adanya investasi lebih. Seperti ketersediaan perangkat keras komputer di masing-masing OPD sudah optimal, hanya saja ketersediaan wifi di setiap OPD perlu di *upgrade* lagi agar implementasi SPBE dapat berjalan dengan semestinya. Serta untuk infrastruktur pelaksanaan Aplikasi SIKAP di Dinas Kominfo sudah terakomodir dengan baik.

C. Ketersedian Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan

Terkait beberapa masalah diatas maka ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan keahlian yang dibutuhkan merupakan elemen terakhir yang harus dimiliki oleh pemerintah. bahwa untuk menunjang ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan personel dari Dinas Kominfo sendiri. Selain itu Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman juga sudah memiliki tenaga ahli di bidangnya seperti dalam bidang IT, programmer, pengembangan aplikasi, jaringan dan infrastruktur.

3. Value

Value memiliki arti manfaat dengan arti lain pemerintah harus benar-benar teliti dalam mengartikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam elemen ini yang menjadi penentu besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* di semua kalangan. Penerapan *e-government* di suatu daerah diharapkan akan memberi manfaat dalam meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan berguna mewujudkan *good governance*.

Terdapat dua manfaat dalam penerapan Aplikasi SIKAP yang mana dalam manfaat jangka pendek dijelaskan bahwa aplikasi ini akan mengelola kehadiran ASN dan non-ASN sedangkan jangka panjangnya diharapkan ASN dan non-ASN datang tepat waktu ke kantor dan menjadi pribadi yang lebih disiplin.

Aplikasi SIKAP memberikan banyak manfaat bagi pemimpin maupun pegawai yang menggunakannya. Dengan memberikan kemudahan bagi pemimpin dalam melihat kinerja pegawai serta pemimpin dapat memberikan *reward* dan *punishment* dari hasil kinerja dan laporan kepada bawahannya. Dan manfaat bagi ASN dan non-ASN ialah memudahkan dalam pengajuan cuti, perjalanan dinas, izin dan lain sebagainya yang sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi SIKAP tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori elemen sukses penerapan *e-government* oleh Harvard JFK *school of management* yang memuat tiga elemen yaitu; *support*, *capacity*, dan *value*. Berdasarkan penelitian diketahui dari ketiga elemen tersebut satu diantaranya belum mendukung dalam pengembangan *e-government* yaitu pada elemen *capacity*.

Pada elemen *support* dapat disimpulkan bahwa bentuk keberhasilan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman itu berupa adanya *political will* dari Bupati Padang Pariaman dalam bentuk peraturan bupati yang memuat SPBE didalamnya, adanya komitmen dan kesepakatan yang diciptakan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa surat keputusan dan SOP dalam penerapan *e-governemnt*, Adanya kesepakatan bersama antar pemerintah, masyarakat, dan swasta maka *e-governemnt* dapat terwujud dengan semestinya, dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan kerjasama dengan seluruh *steakholder* terutama di pihak swasta dan masyarakat. Selanjutnya Dinas Kominfo telah melakukan sosialisasi kepada ASN dan Honorer yang bekerja di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya elemen *capacity*, dalam elemen ini dijelaskan bahwa sumber daya finansial yang tersedia belum mencukupi secara penuh kebutuhan Dinas Kominfo dalam menjalankan tugasnya, seperti anggaran untuk jaringan internet dengan kapasitas 800mbps untuk mengcover semua layanan masih dirasa kurang memadai. Serta ketersediaan infrastruktur di Dinas Kominfo cukup memadai namun masih butuh investasi lebih dalam hal infrastruktur. Dan dalam meningkatkan potensi dan keahlian pegawai Dinas Koimfo sudah mengikuti berbagai macam pelatihan namun masih ada pegawai yang tidak ada keahlian dalam bidangnya.

Elemen terakhir yaitu *value* artinya manfaat, dalam elemen ini manfaat yang dapat dirasakan oleh ASN dan non-ASN dalam penerapan Aplikasi SIKAP ini yaitu dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan para pegawai di berbagai OPD serta dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena dalam penggunaan Aplikasi SIKAP ini terdapat *reward* dan *punishment*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Habibullah dan Dede Ferawati. 2022. *Government to Employe: Penerapan Aplikasi Sistem Layanan Online Kepegawaian (SiNOK) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Sipil (ASN) di Pemerintahan Kota Tegal. Jurnal Agregasi. Vol 1 (3).*
- Fira Nafisah dan Andi Soemitra. 2022. Implementasi Absensi Online Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan di Kantor Walikota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital. Vol 1 (2).*

- Gunawan Imam.2022. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 134.
- Gunawan Imam.2022. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta; Bumi Aksara.Hlm 160.
- Hidayati Firda. 2022. “Analisis Pengembangan *E-government* Pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada SURADI di Diskominfo Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Vol 8 No 1.
<https://www.worldbank.org> (di terjemahkan)
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Julia Khainiyah Rintoga. 2021. Pemanfaatan Program Absensi Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.UMSU.
- Labolo Muhadam. (2014) *.Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 27-33.
- Mardalis.(2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong J Lexy.(2017) *.Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. Hlm 4-5.
- Nurul Fardiana. 2019. Penerapan Absensi Online “Jathilan” Bagi Pemilik Sekolah Ponerogo Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.*Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*.Vol 8 (2).
- PadangPariamanKab.go.id.2016.”sejarahsingkatkankabupatenpadangpariaman”, diakses <https://padangpariamankab.go.id/blog/berita-tampil/13827> pada 12 Juli 2023
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
- Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.Hlm 30.
- Richardus Eko Indrajit. (2004). *Elektronik Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Robert K. Yin. 2009. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. Hlm 314.
- Syarifuddin, dkk. 2022. Efektivitas Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin ASN di Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Kloaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal of Management and Social Sciences*. Vol 1 (2)
- Tachjan.(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho.2016. Analisis *E-Government* Terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum*. Vol 1 (3).
- Wahidmurni.W. (2017).*Penerapan Metode Penelitian Kualitatif*. 11.
- Winarno Wahyu Agus dan Kusuma Dewi Arum Sari.2017. “Implementasi *E-government* I Syestem Dalam Upaya Peningkatan *Clean And Good Governance* Di Indonesia.”*Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*.Vol 9. No 1. 1-19.

Yordan Putra Anggana, Dkk. 2020. "Upaya Pengembangan *E-government* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.3, No.1.